



News Title : Bappebti Mengakui Robot Trading Tanpa Regulasi

Media Name : Pikiran Rakyat

Journalist : Huminnca Sinaga

Publish Date : 29 March 2022

Tonality : Positive

News Page : 7

News Value : 269,280,000

Resources : Indrasari Wisnu Wardhana (Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti))

Ads Value : 89,760,000

Section/Rubrication : Ekonomi

Topic : Robot Trading



*DIREKTUR Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Auliandah Lubis (kedua kanan) berikan keterangan terkait pengungkapan investasi bodong robot trading Fahrenheit di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Bappebti mengakui belum ada regulasi yang mengatur robot trading di Indonesia.**

REDA: SUKIRNO/RS/ANTARA

Bappebti Mengakui Robot Trading Tanpa Regulasi

JAKARTA, (PR).-

Sebanyak 122 orang korban robot trading DNA Pro, Senin (28/3/2022), melaporkan kasus dugaan penipuan investasi ke Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Ditipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Pengacara korban, Muhammad Zainul Arifin, menjelaskan bahwa kasus yang dialami kliennya adalah perbuatan tindak pidana, bukan lagi dugaan. Jumlah korban juga dipastikan banyak.

Dua pekan lalu, ratusan korban robot trading Fahrenheit juga telah melakukan hal serupa. Bahkan, pemilik robot trading Fahrenheit telah ditangkap dan ditahan.

Dilansir Antara, Senin (28/3/2022), Hendry Susanto ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari di Rutan Bareskrim Polri, sampai dengan 10 April mendatang.

Ditipideksus Bareskrim Polri menangani perkara tersebut berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/115/III/2022/SPKT BARESKRIM POLRI tertanggal 9 Maret.

Kasus itu dilaporkan terkait perkara dugaan tindak pidana menawarkan produk tidak sesuai janji, iktikad iklan maupun promosi dan/atau pelaku usaha distribusi, yang menerapkan sistem

skema piramida (ponzi) dan/atau pelaku usaha yang melakukan distribusi penjualan tanpa memiliki izin dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penjualan paket robot trading Fahrenheit.

Tindak pidana tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perdagangan dan pelanggaran TPPU di wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, dan sejumlah wilayah lain di Indonesia.

Tanpa regulasi

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana mengakui belum ada regulasi yang mengatur robot trading di Indonesia.

"Ada kekosongan hukum, karena sampai sekarang kita belum ada yang mengatur mengenai robot trading. Kita sedang melakukan kajian," kata Wisnu saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI yang disiarkan virtual, di Jakarta, pekan lalu, seperti dilansir Antara.

Wisnu memaparkan robot trading pada prinsipnya menggantikan fungsi manusia dalam melakukan perdagangan.

Namun, lanjutnya, robot trading tidak bisa membuat

keputusan. Soalnya, robot trading hanya sebagai alat analitis yang membaca riwayat ke belakang atau past performance.

"Dia tidak bisa membaca sedang ada misalnya Perang Teluk. Padahal, itu merupakan satu variabel besar dalam perdagangan komoditi berjangka. Harga langsung naik. Nah itu tak dieksploitasi oleh robot trading. Hal ini yang banyak membuat orang rugi juga," ujar Wisnu.

Kendati demikian, Wisnu mengatakan bahwa jika robot trading tersebut baik, akan benar-benar membantu penggunanya.

Pada kesempatan tersebut, Wisnu juga menyampaikan bahwa regulasi selalu lebih lambat dari perkembangan teknologi, mengingat teknologi bersifat eksponensial. Hal tersebut yang membuat regulasi sulit mengejar perkembangan teknologi.

Apresiasi

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan mengapresiasi penangkapan seorang bos robot trading Evotrade setelah menjadi buron sekitar tiga bulan.

"Kami menilai Badan Reserse Kriminal Polri sudah merespons keluhan masyarakat atas kegiatan bisnis ro-

bot trading yang selama ini banyak meresahkan," kata Edi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Robot trading adalah sistem transaksi antara para pelaku jual-beli secara otomatis. Namun sistem tersebut berpotensi merugikan pelaku jual-beli atau investor.

Menurut Edi Hasibuan, Bareskrim Polri harus bisa mengungkap dan menyita seluruh aset yang diduga berasal dari bisnis ilegal ini.

Pemerhati kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta ini mengatakan, Polri bisa menjerat penanggung jawab bisnis robot trading dengan Undang-Undang Pencucian Uang.

"Kami melihat tindakan tegas dari Polri sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menangkap pemilik robot trading Evotrade, Anang Dianto di Kuta, Bali, setelah menjadi buron (daftar pencarian orang/DPO) sejak 17 Januari 2022.

Dalam perkara yang melibatkan Anang Dianto, Bareskrim telah menahan lima tersangka lainnya. Rekening berisi Rp 250 miliar juga telah diblokir polisi. (Huminnca Sinaga)***